

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI 04 KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Monika Rianti^{1*}, Harjito², Seodjono³

^{1,2,3}Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

Email: aguslymonika2@gmail.com^{*}

Article History	Received	Accepted	Published
	2025-10-06	2025-11-10	2025-12-05

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana komunikasi implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka, (2) mengetahui bagaimana sumber daya implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka, (3) mengetahui bagaimana disposisi implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka, (4) mengetahui bagaimana birokrasi implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) komunikasi pada pendidikan karakter kurikulum merdeka adalah komunikasi intern antara guru dan wali kelas, dengan siswa, dan dengan waka kesiswaan. Komunikasi ekstern dengan komite sekolah, dengan orang tua, dengan Lembaga KPAI, dengan dinas sosial. 2) Sumber daya guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka melalui kegiatan komunitas belajar, pelatihan in house training, serta supervisi kepala sekolah. Salah satu bentuk peningkatan sumber daya guru guna mendukung implementasi kurikulum merdeka pada aspek pendidikan karakter adalah dengan mengikuti kegiatan komunitas belajar. 3) Disposisi atau bentuk dukung dan komitmen guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka diantaranya a) dukungan dan sikap dalam bentuk pembelajaran yang terintegrasi dengan pembiasaan karakter anak; b) dukungan dalam bentuk ide dan gagasan; c) dukungan dalam bentuk sinergitas besama dalam pengawasan peserta didik. 4) Birokrasi pendidikan karakter kurikulum merdeka, mulai dari pendeklegasian tugas berdasarkan kompetensi, pembagian struktur kepengurusan sesuai dengan kebutuhan maupun hierarki kewenangan masing-masing berdasarkan peran, dan aturan main serta mekanisme penanganan masalah anak.

Kata Kunci: manajemen pendidikan karakter, kurikulum merdeka, komunikasi, sumber daya guru, birokrasi sekolah

Abstract

This study aims to: (1) find out how the communication of the implementation of the independent curriculum character education management, (2) find out how the resources for the implementation of the independent curriculum character education management, (3) find out how the disposition of the implementation of the independent curriculum character education management, (4) find out



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

how the bureaucracy of the implementation of the independent curriculum character education management at SMP Negeri 04 Kateman, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The method used is qualitative research with a case study type. The research instrument is the researcher himself. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that: 1) communication in the independent curriculum character education is internal communication between teachers and homeroom teachers, with students, and with the student affairs vice principal. External communication with the school committee, with parents, with the KPAI Institute, and with the social service. 2) Teacher resources in the independent curriculum character education through learning community activities, in-house training, and principal supervision. One form of increasing teacher resources to support the implementation of the independent curriculum in the aspect of character education is by participating in learning community activities. 3) Disposition or form of support and commitment of teachers to the character education of the independent curriculum, including a) support and attitude in the form of learning that is integrated with the habituation of children's character; b) support in the form of ideas and concepts; c) support in the form of joint synergy in supervising students. 4) Bureaucracy of the character education of the independent curriculum, starting from the delegation of tasks based on competence, division of management structure according to the needs and hierarchy of authority of each based on roles, and rules of the game and mechanisms for handling children's problems.

Keywords: character education management, independent curriculum, communication, teacher resources, school bureaucracy

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah merumusan kebijakan dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025 ditegaskan bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa. Olah hati terkait dengan perasaan sikap dan keyakinan, olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif, olah raga terkait dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas, serta olah rasa dan karsa berhubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan Pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (Artharina, 2019: 80).

Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang pendidikan karakter Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal saat ini sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan anak usia sekolah merupakan aset bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang berbudaya dan memiliki semangat kebangsaan, peduli sosial serta cinta tanah air.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Dalam Undang-undang No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggungjawab. Sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Sebab anak merupakan dambaan bagi setiap orangtua dan anak adalah bagian dari generasi sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sehubungan dengan ketetapan Undang-undang dasar dan Undang-undang tentang Sisdiknas serta tujuan pendidikan nasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah bahwa pendidikan di masa yang akan datang ini harus memiliki mutu dan berkualitas dibanding dengan pelaksanaan pendidikan yang telah berlangsung saat sekarang ini. Maka daripada itu perlu ditegaskan bahwa Keputusan Presiden RI No 1 Tahun 2010 setiap jenjang pendidikan di Indonesia harus melaksanakan pendidikan karakter (Artharina, 2019: 81).

Pendekatan kurikulum merdeka dengan memperiositaskan manajemen pendidikan karakter sejalan dengan pendapat Hastanti (2023: 65) menjelaskan bahwa pendekatan kurikulum merdeka lebih luas dan kontekstual serta bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang beragam dan bermakna bagi siswa terutama dalam pembentuk karakter. Sandy (2023: 65) menjelaskan bahwa kurikulum merdeka diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, di mana siswa tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi insan yang cerdas, namun juga memiliki aspek moralitas yang kuat.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk peningkatan pelatihan bagi guru, penyediaan sumber daya pendidikan yang diperlukan, dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program ini. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka merupakan upaya untuk mengubah pendekatan pendidikan di Indonesia agar lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan global, serta untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi dalam masyarakat dan pasar kerja yang semakin kompleks. Di SMP Kurikulum Merdeka Belajar menekankan pentingnya pengembangan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Keterampilan tersebut mencakup pemecahan masalah, kreativitas, pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan keterampilan sosial emosional. Kurikulum ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dan relevan dimana teknologi dan informasi terus berkembang pesat (Hastanto; 2020: 65)

Implementasi dalam Kurikulum Merdeka khususnya pada masalah manajemen pendidikan karakter akan memungkinkan sekolah untuk mengintegrasikan pengembangan karakter dalam setiap aspek kurikulum, termasuk pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan program-program pengembangan diri. Sekolah dapat menggunakan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam manajemen pendidikan karakter untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan karakter siswa secara menyeluruh. Dampak positif melalui manajemen pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang lebih berintegritas, bertanggungjawab, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat penerapan pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka juga dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan produktif. Dengan demikian, manajemen pendidikan karakter dalam penerapan Kurikulum Merdeka memiliki relevansi yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa di Indonesia. Pentingnya pendidikan karakter dianggap krusial dalam pembentukan individu yang berkualitas, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membentuk sikap, nilai-nilai, dan moralitas yang baik. Oleh

karena itu, penting untuk memastikan bahwa pendidikan karakter diberikan dengan efektif (Nugroho, 2018: 104).

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembentukan individu yang baik, beretika, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan karakter sangat penting membangun kepribadian yang baik. Pendidikan karakter membantu individu untuk mengembangkan kepribadian yang baik, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggungjawab, dan empati. Dengan memiliki karakter yang baik, individu akan mampu berperilaku dengan baik dalam berbagai situasi kehidupan, menumbuhkan etika dan moral pendidikan karakter membantu individu memahami perbedaan antara benar dan salah, serta mengembangkan pemahaman tentang etika dan moral yang baik. Hal ini penting untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran moral dan dapat membuat keputusan yang baik, membangun hubungan sosial yang sehat karakter yang baik membantu individu dalam membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan membantu individu untuk membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat, membentuk kepemimpinan yang berkualitas pendidikan karakter membantu dalam pembentukan kepemimpinan yang berkualitas. Pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memimpin dengan contoh yang baik (Nugroho, 2018: 104).

Pendidikan karakter membantu melatih dan membiasakan dalam pengambilan keputusan individu dengan karakter yang baik cenderung lebih mampu dalam pengambilan keputusan yang tepat, karena mereka memiliki landasan moral yang kuat untuk memandu tindakan dan keputusan mereka, Kontribusi positif terhadap masyarakat individu yang memiliki pendidikan karakter yang baik cenderung lebih berkontribusi positif terhadap masyarakat, baik melalui tindakan sukarela, kegiatan sosial, maupun melalui pengabdian kepada orang lain. Dengan demikian, pendidikan karakter memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang baik, beretika, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Tantangan dalam manajemen pendidikan karakter ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam manajemen pendidikan karakter di sekolah, termasuk pengukuran karakter yang sulit, kurangnya pelatihan bagi guru dalam aspek pendidikan karakter, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat yang mungkin kurang optimal adalah kurangnya penelitian yang spesifik meskipun ada banyak penelitian tentang pendidikan karakter dan implementasi kurikulum di Indonesia, masih ada kekurangan penelitian yang secara khusus mengeksplorasi manajemen pendidikan karakter dalam konteks kurikulum merdeka. Kebutuhan akan evaluasi dan peningkatan evaluasi terhadap manajemen pendidikan karakter pada penerapan kurikulum merdeka diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan karakter dapat tercapai secara optimal. Temuan dari penelitian semacam ini dapat memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan.

Pengembangan pendidikan karakter dalam konteks teori Edward III dimulai dari 1) aspek komunikasi. Pada aspek komunikasi ini berarti bagaimana pengembangan karakter dapat dikomunikasikan dengan semua stakeholder sekolah. Komunikasi diharapkan dapat merangkul semua kepentingan dalam ikut mendukung keberhasilan dari pengembangan karakter tersebut. 2) Aspek sumber daya. Pada aspek ini berarti dukungan sumber daya harus terpenuhi untuk

keberhasilan pengembangan karakter, sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggrang maupun sumberdaya sarana prasarana. 3) Pada aspek disposisi. Ini artinya para pelaksana kebijakan perlu memiliki sikap optimis dan komitmen terhadap program pengembangan karakter yang telah disepakati, sikap optimis, komitmen, disiplin dan pantang menyerah akan mendorong bekerja lebih semangat yang pada akhirnya akan mencapai keberhasilan. 4) Birokrasi. Pengembangan karakter juga perlu adanya alur birokrasi yang jelas yang dapat mendorong keberhasilan penguatan karakter. Jika alur birokrasi tidak berjalan dengan baik akan dapat mempengaruhi ketidak berhasilan program.

Berdasarkan fakta lapangan, sebenarnya SMP Negeri 04 Kateman dalam menjalankan implementasi kurikulum merdeka berdasarkan teori Edward III dimana pada aspek komunikasi sekolah sudah melakukan komunikasi baik secara vertikal seperti instansi, Dinas pendidikan maupun secara horizontal dengan guru dan masyarakat setempat untuk mendukung kebijakan yang ada di sekolah. Kemudian pada aspek sumber daya juga sekolah terus memperkuat sumberdaya manusia melalui pelatihan untuk para guru, kemudian sumber daya anggaran dengan melibatkan partisipasi dana gotong royong dari masyarakat. Akan tetapi pada aspek disposisi dan birokrasi yang memang kurang optimal dilaksanakan di SMP Negeri 01 Kateman.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan kepala sekolah terkait Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 04 Kateman bahwa sekolah tersebut menjalankan kegiatan pembelajaran sudah menggunakan Kurikulum Merdeka sesuai aturan pemerintah, sebagai kepala sekolah sudah mengupayakan komunikasi secara baik dengan pendidik di sekolah, secara jelas pula kepala sekolah menjelaskan terkait pendidikan karakter bahwa Karakter itu sendiri adalah kebiasaan. Karakter atau kebiasaan peserta didik yang dianggap baik maupun kurang baik. Karakter setiap peserta didik berbeda-beda, dimana karakter itu terbentuk oleh pola asuh lingkungan terutama lingkungan keluarga. Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk melaksanakan pembentukan karakter peserta didik di sekolah, dengan adanya penguatan karakter ini merupakan bentuk upaya sekolah memperkuat karakter peserta didik melalui olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dan tentunya kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.

Peneliti juga melaksanakan wawancara secara langsung dengan pimpinan sekolah yaitu Ibu Nia Tica, S.Pd. tentang latar belakang SMP Negeri 04 Kateman beliau berkata bahwa pendidikan karakter Kurikulum Merdeka sudah berjalan namun Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan sebagai model untuk semua guru dan peserta didik di sekolah. Dimana gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kepala Sekolah juga mengimbau setiap guru harus melakukan pengembangan kompetensinya secara berkelanjutan untuk membantu melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal. Selain itu, langkah Kepala Sekolah dalam upaya pembentukan karakter peserta didik bisa menggunakan cara tersendiri misalnya dengan cara pendekatan langsung dengan siswa, melihat perkembangan siswa dan ikut menangani permasalahan siswa secara langsung agar tercapai pembentukan karakter siswa.

Pihak sekolah terus mengembangkan Kurikulum Merdeka terutama pengembangan yang mengarah kepada penguatan karakter peserta didik. Pengembangan karakter dilakukan dengan menerapkan pendidikan di luar kelas atau ekstrakurikulir untuk melatih kedisiplinan, ketangkasian maupun ketrampilan lainnya. Kemudian ada lagi yaitu kebijakan kurikulum

merdeka dalam pembelajaran. Kebijakan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dikelas dimana pembelajaran terpusat pada siswa sebagai objek sekaligus subjek pembelajaran. Kebijakan kurikulum merdeka pada aspek pembelajaran jugadiharapkan dapat membentuk karakter anak.

Berdasarkan fakta lapangan hasil observasi prapenelitian bahwa selama ini manajemen pendidikan karakter pada Kurikulum Merdeka kurang dilaksanakan secara kurang optimal oleh guru. Masih banyak guru yang masih kurang dapat memahami bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka yang terfokus pada penguatan karakter peserta didik. Hasil wawancara bersama dengan salah satu guru di SMP Negeri 04 Kateman bahwa guru lebih terfokus pada asemen, pembelajaran dikelas, melakukan penilaian secara akademik. Sementara perkembangan karakter anak kurang mendapat perhatian. Fungsi guru hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan kurang terfokus pada pembentuk karakter anak.

Pandangan-pandangan miring masyarakat, serta sikap yang cenderung menyalahkan pelaksanaan pendidikan agama yang ada di sekolah umum itulah yang kemudian memotivasi pemerintah dalam hal ini kemendiknas untuk merumuskan inovasi baru dalam pengembangan pendidikan di Negara ini. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dirumuskan dalam publikasi Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional berjudul Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011), telah mengidentifikasi 18 nilai pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional.

Ditanamkannya pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu karakter dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter yang berbudi luhur peserta didik secara utuh, seimbang dan terpadu. Penanaman pendidikan karakter diharapkan mampu menggunakan pengetahuannya, mengkaji, menginternalisasi dan mempersonalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Pendidikan karakter memiliki unsur-unsur pendidikan yang dikelola melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

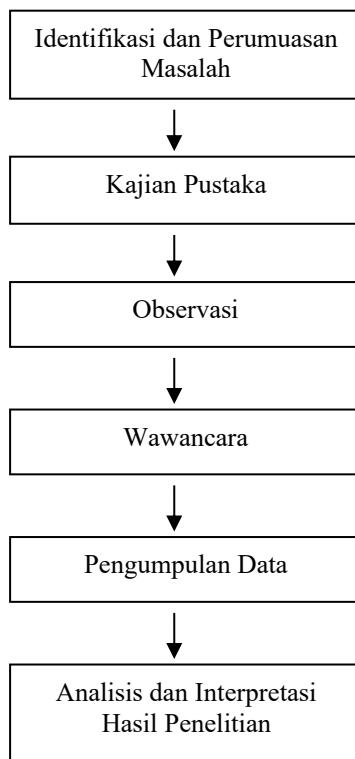
Studi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, yaitu penelitian oleh Habibullah (2023) menyatakan manajemen pendidikan karakter dilakukan dengan mengagitas program sekolah penggerak dengan tujuan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yaitu pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotongroyong dan berkebhinnekaan global. Didukung penelitian Pangkey dan Wongkar (2024) bahwa implementasinya strategi meningkatkan kualitas siswa melalui Kurikulum Merdeka Belajar meliputi beberapa hal: (1) Pengembangan Keterampilan Abad Ke-21, (2) Penggunaan Teknologi, (3) Pengembangan Karakter, (4) Pembelajaran Bermakna dan Berkualitas. Penelitian Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa: (1) enam dimensi dengan elemen dan subelemennya merupakan manifestasi dari lima sila Pancasila; (2) implementasi Kurikulum Merdeka berorientasi pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah penggerak dilakukan dalam empat tahapan, yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui bagaimana komunikasi implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka, 2) Mengetahui Bagaimana sumber daya implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka, 3) mengetahui Bagaimana disposisi implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka, 4) mengetahui

Bagaimana birokrasi implementasi manajemen pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini berlokasi di SMPN 04 Kateman kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.



Gambar 1. Alur Penelitian

Metode Observasi

Metode observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada obyek. Adapun teknik pengamatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan tersembunyi dan pengamatan terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan situasi yang alamiah dari data yang diperoleh valid dan realistik. Dalam proses observasi, peneliti mengamati secara langsung baik melalui daring maupun luring terhadap praktik aktivitas disekolah yang berkaitan dengan implementasi manajemen pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka.

Tabel 1. Kegiatan Observasi

No	Kegiatan Pengamatan	Frekuensi	Koding
1	Pembelajaran di kelas	2	Ob1
2	Kegiatan Pramuka	2	Ob2
3	Kegiatan PMR	2	Ob3
4	Rapat intern Guru	2	Ob4
5	Rapat Bersama Komite	2	Ob5
6	Kesopanan dan prilaku siswa pada jam istirahat	3	Ob6
7	Keteladanan guru	3	Ob7
8	Kedisiplinan warga sekolah	3	Ob8

Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung merupakan cara yang cukup efektif, sebab data akan diperoleh secara lengkap, pertanyaan yang kurang jelas atau meragukan dapat dijelaskan dan hasilnya dapat diperoleh saat itu juga (Sukmadinata, 2013: 84). Seperti halnya observasi, wawancara juga memiliki beberapa macam jenis. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yang merupakan jenis wawancara *in-depth interview*.

Tabel 2. Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah	Koding
1	Kepala Sekolah	1	WKS
2	Waka Kesiswaaan	1	WWK
3	Guru Mata Pelajaran	3	WGR
4	Wali Kelas	3	WWKLS
5	Komite Sekolah	2	WKS
6	Siswa	5	WSS
7	Orang tua	2	WOT

Uji Keabsahan

Uji keabsahan (*validity testing*) adalah proses evaluasi sejauh mana suatu instrumen pengukuran atau metode pengumpulan data dapat dianggap akurat dan relevan dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji keabsahan merupakan bagian penting dari proses penelitian dan pengembangan instrumen untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa jenis uji keabsahan yang umum digunakan:

Keabsahan isi (*content validity*): Melibatkan evaluasi sejauh mana instrumen mencakup semua aspek yang relevan dari konsep atau variabel yang diukur. Dilakukan oleh ahli di bidang

tersebut yang menilai relevansi dan kecocokan antara pertanyaan atau item dengan konsep yang diukur.

Keabsahan fasial (*face validity*): Mengukur sejauh mana instrumen tampaknya mengukur apa yang seharusnya diukur. Tidak memerlukan uji statistik khusus, tetapi dapat memberikan gambaran awal tentang apakah instrumen terlihat tepat untuk tujuan pengukuran. Keabsahan kriteria (*criterion-related validity*): Melibatkan perbandingan hasil instrumen dengan kriteria eksternal yang dianggap sebagai standar emas atau acuan yang valid. Dibagi menjadi dua jenis yaitu validitas kriteria konvergen (hasil instrumen berkorelasi dengan kriteria yang seharusnya berkorelasi) dan validitas kriteria divergen (instrumen tidak berkorelasi dengan kriteria yang seharusnya tidak berkorelasi).

Keabsahan konstruksi (*construct validity*) Menilai sejauh mana instrumen mengukur konsep atau konstruk yang seharusnya diukur. Dapat diukur melalui analisis faktor, uji hipotesis, atau teknik lain yang mendukung hubungan antara variabel dan konsep teoritis. Keabsahan eksternal (*external validity*) Menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau umumnya dapat diterapkan pada populasi atau situasi di luar sampel penelitian. Melibatkan pertimbangan tentang generalisabilitas hasil penelitian. Keabsahan historis (*historical validity*) Menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks waktu tertentu dan apakah hasil tersebut berlaku selama periode waktu yang lebih lama. Setiap jenis uji keabsahan memiliki tujuannya masing-masing dan dapat memberikan wawasan yang berbeda tentang sejauh mana suatu instrumen atau metode pengumpulan data dapat diandalkan dan akurat. Uji keabsahan harus dilakukan secara cermat untuk memastikan kehandalan dan validitas data yang dikumpulkan

Pada penelitian ini akan menggunakan keabsahan isi. Keabsahan isi akan digunakan untuk mengetahui sejauhmana pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan focus penelitian, selain itu hasil penelitian akan dicocokan melalui keabsahan isi, antara isi hasil wawancara, pengamatan dan dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau

Hasil penelitian ini kemudian dapat diambil kesimpulan terkait dengan komunikasi guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau adalah 1) Komunikasi intern sekolah yang meliputi (a) Komunikasi antar guru dan wali kelas; (b) Komunikasi dengan siswa; (c) Komunikasi dengan waka kesiswaan; (Komunikasi dalam bentuk kolektif). 2) Komunikasi eksteren sekolah meliputi (a) Komunikasi dengan komite sekolah; (b) Komunikasi dengan orang tua; (c) Komunikasi dengan Lembaga KPAI; (d) Komunikasi dengan dinas sosial. Temuan penelitian di atas terkait dengan komunikasi pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Kateman dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi memperkuat program dan sosialisasi sehingga bisa dilaksanakan oleh semua pihak terkait dengan pendidikan karakter ini.

Komunikasi intern sekolah terhadap semua warga sekolah diantaranya guru tenaga kependidikan maupun siswa secara berkelanjutan baik dalam bentuk rapat koordinasi maupun

dalam bentuk diskusi sederhana antar sesama guru guru dengan wali kelas semua itu dalam bentuk komunikasi guna mendukung program pendidikan karakter pada kurikulum merdeka.

Kemudian hasil temuan penelitian terkait dengan komunikasi pada pendidikan karakter sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 4 Kateman adalah bentuk komunikasi ekstern. Komunikasi ekstern ini yang dimaksud adalah bagaimana sekolah mampu membangun pola komunikasi dan koordinasi dengan orang di luar sekolah seperti komite orang tua warisan umur maupun dengan instansi terkait sehingga program pendidikan karakter mendapat dukungan baik secara intern maupun ekstern sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam sebuah pelaksanaan program kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori Edward (Tahir, 2014:62-64) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, harus disampaikan informasi secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Setiap kebijakan dapat dilakukan dengan baik jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan kelompok sasaran (target group).

Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya ketidaktahuan atas kebijakan dan program (Indiahono, 2019:31). Komunikasi memiliki peran krusial dalam kebijakan publik karena membantu pihak sekolah dalam mengkomunikasikan tujuan kebijakan, menjalin hubungan dengan masyarakat, dan memastikan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif juga memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan revisi kebijakan berdasarkan masukan semua pihak.

Hasil penelitian ini selaras dengan Julaiha, S. (2014) yang menjelaskan bahwa komunikasi yang baik memungkinkan semua komponen untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, sehingga menciptakan rasa memiliki dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif membantu menghindari mispersepsi atau informasi yang salah tentang kebijakan, sehingga dapat mencegah penolakan atau ketidakpatuhan.

Winarno (2018:177) berpandangan jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila hal tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan bagi para pelaksana kebijakan menjalankan tugas dengan baik. Disisi yang lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan pendidikan.

Penulis percaya bahwa setiap kebijakan publik selayaknya ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan, karena implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001:177). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984:1) bahwa tanpa implementasi dan komunikasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Sumber daya guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

Sumber daya guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sudah cukup bagus. Penguatan sumber daya guru dilakukan melalui kegiatan komunitas belajar, pelatihan In House Training, serta supervisi kepala sekolah. Salah satu bentuk peningkatan sumber daya guru guna mendukung implementasi kurikulum merdeka pada aspek pendidikan karakter adalah dengan mengikuti kegiatan komunitas belajar. Komunitas belajar adalah wadah bagi sekelompok orang, terutama pendidik dan tenaga kependidikan, untuk belajar bersama, berkolaborasi, dan saling berbagi pengetahuan serta praktik baik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali baik guru mata pelajaran maupun wali kelas dari berbagai sekolah SMP yang ada di kabupaten Indragiri selain itu juga komunitas belajar ini sebagai wadah untuk saling berdiskusi meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kemampuan diri.

Sumber daya guru berdasarkan temuan penelitian yang ada di SMP negeri 4 Kateman sudah memiliki kompetensi serta SDM yang mumpuni dalam mendukung dan melaksanakan pendidikan karakter di sekolah temuan penelitian bahwa guru-guru di SMP negeri 4 pendidikan terakhir adalah S1 pada bidang pendidikan selain itu guru juga mengikuti pelatihan kegiatan In House Training untuk memperkuat wawasan dan praktek daripada kurikulum merdeka sebagai bagian dari kebijakan baru yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kateman.

In House Training diadakan sebagai bagian dari upaya sekolah meningkatkan sumber daya guru sehingga dapat mendukung pendidikan karakter. Hasil temuan penelitian bahwa kegiatan In House Training adalah melatih guru untuk mengenal bagaimana nilai-nilai karakter dapat terintegrasi dalam konsep pembelajaran di kelas sehingga guru dalam pembelajaran bisa menyampaikan materi sekaligus memberikan pembiasaan-pembiasaan nilai karakter.

Kemudian selain kegiatan In House Training juga sumber daya guru ditingkatkan melalui supervisi kepala sekolah. Hasil temuan diketahui bahwa kepala sekolah melakukan tindakan supervisi dua kali dalam satu semester titik pelaksanaan supervisi dimaksudkan untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam kunjungan kelas.

Sumber daya yang mendukung setiap kebijakan harus memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Menurut Edward III (Indiahono, 2019:31) Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melengkapi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya sumber daya tersebut harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan jadi berjalan lamban dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya guru sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan sekolah karena mereka adalah implementor utama dari kebijakan tersebut. Guru yang kompeten dan profesional akan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. Sebaliknya, guru yang tidak kompeten dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengganggu proses pembelajaran.

Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Mulyasa (2020: 68) bahwa guru adalah ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan yang abstrak menjadi tindakan nyata di dalam kelas. Guru yang kompeten memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan kebijakan sekolah dengan baik. Mereka juga mampu mengadaptasi kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks kelas.

Hasil penelitian ini didukung oleh Rohman, (2018) bahwa karakter dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan guru, sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala sekolah. Pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Fokus kajian utama penelitian ini adalah manajemen penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Metode penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kegiatan observasi, dokumentasi dan wawancara studi kasus di SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara.

Sumber daya guru yang berkualitas adalah kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter di sekolah. Guru yang kompeten dan profesional akan mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Sumberdaya guru merupakan teladan yang sangat penting untuk mengatasi karakter dan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendidik dan membina karakter peserta didik. Guru adalah salah satu sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan menyongsong pembangunan bangsa yang berkarakter.

Wahyu Wirawan, Arif, dan Wahyudi. (2016: 35) menjelaskan Peran pendidik pada intinya adalah membentuk karakter peserta didik dengan memberikan motivasi, stimulus serta guru memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi nilai dan karakter anak-anak setidaknya dalam cara yaitu Guru dapat menjadi pengasuh yang efektif -mengasihi dan menghormati siswa, membantu siswa meraih keberhasilan disekolah, membangun penghargaan diri siswa, dan membantu siswa merasakan moralitas yang sesungguhnya dengan mengamati bagaimana cara guru memperlakukan peserta didik dengan cara yang bermoral.

Pendidikan karakter dapat dikembangkan dengan beberapa cara yaitu dengan pembiasaan, pengintegrasian, serta memberi contoh atau teladan sehingga guru harus berupaya untuk melaksanakan strategi yang digunakan untuk menarik perhatian peserta didik secara maksimal. Akan tetapi disini yang terjadi hanya melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran serta pembiasaan-pembiasaan sikap kepada peserta didik sedangkan contoh peneladhan sikap kepada peserta didik yang sesuai dengan Permendikbud no 23 Tahun 2015 belum sepenuhnya diterapkan oleh guru disekolahan tersebut (Zulhijrah. 2015: 115)

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang dominan dalam suatu lembaga atau organisasi, khususnya dalam dunia pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam pendidikan guna memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Menurut Notoadmodjo, (202: 115) masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan bagi organisasi untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai

peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat membawa keberhasilan pelaksanaan kegiatan suatu lembaga atau organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia mengandung tugas untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu lembaga secara optimal, sehingga sumber daya manusia dapat bekerja secara maksimal untuk bersama-sama mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi (Mareyke Jessy Tanod, dkk. 2015).

Dispositioni guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

Temuan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa disposisi atau bentuk dukungan dan komitmen guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau diantaranya adalah (1) dukungan dan sikap dalam bentuk pembelajaran yang terintegrasi dengan pembiasaan karakter anak; (2) dukungan dalam bentuk ide dan gagasan; (3) dukungan dalam bentuk sinergitas besama dalam pengawasan peserta didik.

Komitmen dan dukungan guru pada pendidikan karakter di sekolah ini berdasarkan temuan penelitian salah satunya adalah dukungan dalam bentuk pembelajaran. Artinya bahwa berdasarkan fakta lapangan guru melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter pada sela-sela waktu pembelajaran guru memberikan arahan dan nasehat selain itu pembiasaan pembelajaran diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa ini menjadi bagian dari salah satu pendidikan karakter melalui aspek pembiasaan di kelas dukungan guru ini sangat penting sehingga pembelajaran dan kurikulum karakter bisa terintegrasi dalam konsep pembelajaran.

Hasil temuan penelitian dukungan sikap dan komitmen guru sebagai bagian dari komponen disposisi adalah dengan dukungan dalam bentuk ide dan gagasan titik hasil temuan di lapangan bahwa guru memberikan banyak argumen-argumen inovasi inovasi berpikir tentang program sehingga pendidikan karakter menjadi lebih substantif mengenai pada nilai-nilai karakter pada anak.

Selain itu bentuk dukungan guru juga diimplementasikan dalam bentuk pengawasan artinya guru wali kelas guru BK maupun warga kesiswaan sama-sama bekerjasama untuk memonitoring sikap dan perilaku siswa. Karena keberhasilan pendidikan karakter adalah perubahan pada sikap perilaku etika kesopanan siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah oleh karena itu monitoring secara berkelanjutan pengawasan yang terfokus pada perubahan sikap anak menjadi penting untuk dilakukan.

Faktor ketiga yang menjadi pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edward III adalah disposisi. Edward III (Tahir, 2014:68-70) menegaskan bahwa sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas

untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor disposisi manusia, yaitu karakteristik dan sikap seseorang, sangat penting dalam kebijakan sekolah karena ia menentukan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diterima. Disposisi yang positif (misalnya, komitmen, kejujuran, dan demokratis) akan membantu menciptakan implementasi kebijakan yang efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mareyke Jessy Tanod, dkk. (2015: 15) disposisi menentukan bagaimana seseorang (guru, siswa, staf, dll.) berinteraksi dengan dan merespon kebijakan. Jika seseorang memiliki disposisi yang baik, ia cenderung lebih kooperatif, memahami tujuan kebijakan, dan mendukung implementasinya.

Disposisi manusia adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sekolah. Dengan memahami peran dan tantangan yang terkait dengan disposisi, sekolah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.

Birokrasi pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa birokrasi pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sudah diatur sebaik mungkin, mulai dari pendelegasian tugas berdasarkan kompetensi, pembagian struktur kepengurusan sesuai dengan kebutuhan maupun hierarki kewenangan masing-masing berdasarkan peran, dan aturan main serta mekanisme penanganan masalah anak.

Hasil temuan penelitian bahwa birokrasi administrasi struktur organisasi terkait dengan pendidikan karakter dipermudah selain itu mekanisme mekanisme yang tidak singkat padat akan dipangkas sehingga lebih mudah dalam penanganan titik hasil temuan penelitian juga diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa birokrasi pendidikan karakter berdasarkan sop yang telah ditetapkan dalam program P3K penguatan pendidikan karakter dari dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi.

Struktur organisasi/birokrasi sangat penting bagi implementasi kebijakan. Aspek ini terbagi mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan, struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat (Indiahono, 2019:31).

Hasil penelitian ini selaras dengan Hikmah, Sanusi, Mulyasana dan Iriantara. 2019. Manajemen Pendidikan Karakter Pada SMP Al Azhar DKI Jakarta. Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019. Temuan Penelitian: (1) program pendidikan karakter merupakan hasil rapat kerja dewan guru bersama tenaga kependidikan dan melibatkan orangtua murid, (2) Pelaksanaan program pendidikan karakter sudah cukup optimal, tetapi

pencapaian hasil masih rendah karena keterbatasan waktu dan kemampuan para pelaksana kegiatan di lapangan yang masih kurang komunikasi dan koordinasi antara guru dengan guru serta pimpinan sekolah, (3) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter antara lain kurangnya kesadaran dan semangat guru, tenaga kependidikan dan siswa dalam melaksanakan berbagai aturan sekolah serta regulasi dana dari yayasan yang kurang lancar.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rohman, (2018). Manajemen Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah Dasar (Studi di SD UT Bumi Kartini)”. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, dua orang guru, perwakilan siswa, unsur wali murid, dan ketua komite sekolah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan guru, sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala sekolah. Pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Fokus kajian utama penelitian ini adalah manajemen penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Metode penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kegiatan observasi, dokumentasi dan wawancara studi kasus di SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Pada Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Komunikasi intern sekolah yang meliputi (a) Komunikasi antar guru dan wali kelas; (b) Komunikasi dengan siswahi; (c) Komunikasi dengan waka kesiswaan; (Komunikasi dalam bentuk kolektif). 2) Komunikasi eksteren sekolah meliputi (a) Komunikasi dengan komite sekolah; (b) Komunikasi dengan orang tua; (c) Komunikasi dengan Lembaga KPAI; (d) Komunikasi dengan dinas sosial. 2) Sumber daya guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Sumber daya guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sudah cukup bagus. Penguatan sumber daya guru dilakukan melalui kegiatan komunitas belajar, pelatihan *In House Training*, serta supervisi kepala sekolah. Salah satu bentuk peningkatan sumber daya guru guna mendukung implementasi kurikulum merdeka pada aspek pendidikan karakter adalah dengan mengikuti kegiatan komunitas belajar.

Dispositioni guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau bahwa disposisi atau bentuk dukung dan komitmen guru pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau diantaranya adalah (a) dukungan dan sikap dalam bentuk pembelajaran yang terintegrasi dengan pembiasaan karakter anak; (b) dukungan dalam bentuk

ide dan gagasan; (c) dukungan dalam bentuk sinergitas besama dalam pengawasan peserta didik.

Birokrasi pada pendidikan karakter kurikulum merdeka di SMP Negeri 04 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sudah diatur sebaik mungkin, mulai dari pendeklegasian tugas berdasarkan kompetensi, pembagian struktur kepengurusan sesuai dengan kebutuhan maupun hierarki kewenangan masing-masing berdasarkan peran, dan aturan main serta mekanisme penangan masalah anak.

Daftar Pustaka

Aisyah, M. (2018). Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya. Kencana.

Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Kontekstual*, 4(2), 67–75.

Camelia, F. (2020). Implementasi kebijakan program tahlidz Al-Qur'an sebagai upaya penguatan pendidikan karakter di Pondok Pesantren Al-Qur'an Putri Ibnu Katsir Jember. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(1), 1–10.

Danang Prasetyo, & Marzuki. (2016). Pembinaan karakter melalui keteladanan guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta. *Pasca Sarjana Universitas Yogyakarta*.

Dewi, R. S. (2017). Implementasi pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X di SMA Sultan Mahmud Badaruddin Palembang. *UIN Raden Fatah Palembang*.

Dharin, A. (2019). Pendidikan karakter berbasis komunikasi edukatif religius (KER) di Madrasah Ibtidaiyah. *Informasi*, 1(100).

Habibullah, N. (2023). Manajemen pendidikan karakter pada Kurikulum Merdeka Belajar. *At-Ta'lîm*, 5(1), 43–53.

Hanipah, S., Jalan, A., Mopah, K., & Merauke, L. (2023). Analisis Kurikulum Merdeka Belajar dalam memfasilitasi pembelajaran abad ke-21 pada siswa menengah atas. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(2), 264–275.

Hasibuan, A. A., Syah, D., & Marzuki, M. (2018). Manajemen pendidikan karakter di SMA. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(2), 191. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v4i02.1230>

Hilmin, H., Noviani, D., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan Kurikulum Merdeka. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 148–162. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i2.565>

Julaiha, S. (2014). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. *Dinamika Ilmu*, 14(2), 226–239.

Maulana, I. (2022). Manajemen pendidikan karakter Al-Quran. *Al-Munadzomah*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v2i1.397>

Mareyke Jessy Tanod, dkk. (2015). Manajemen sumber daya pendidik dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal FKIP Unila*.

Miles, M. B., & Huberman, M. (2020). Analisis data kualitatif. Universitas Indonesia.

Minsih, M., Fuadi, D., & Rohmah, N. D. (2023). Character education through an independent curriculum. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 597–602. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2812>

Mohamad Mustafid Hamdi, Yusuf, M., & J. J., A. (2023). *Jurnal Pikir*, 9(1).

Ngamanken, S. (2014). Pentingnya pendidikan karakter. *Humaniora*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2983>

Novitasari, R. D., Wijayanti, A., & Arthurina, F. P. (2019). Analisis penerapan penguatan pendidikan karakter sebagai implementasi Kurikulum 2013. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 2(2), 79. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v2i2.19495>

Pikri, F., Abubakar, R. R. T., & Adawiyah, N. (2019). Implementasi Peraturan Bupati

Purwakarta No. 69 Tahun 2015 tentang pendidikan berkarakter. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 12–19. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7632>

Prastowo, A. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Ar-Ruzz Media.

Purna, T. H., Prakoso, C. V., & Dewi, R. S. (2023). Pentingnya karakter untuk pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(1), 192–202.

Rahmat, D. (2017). Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>

Saiful, Yusliani, H., & Rosnidarwati. (2022). Implementasi pendidikan karakter: Perspektif Al-Ghazali & Thomas Lickona di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 11(1), 721–740. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.1900>

Saputro, D. J., & Murdiono, M. (2020). Implementation of character education through a holistic approach to senior high school students. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(1), 460–470.

Sari, W. N., & Faizin, A. (2023). Pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar pada Kurikulum Merdeka. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 957.

Sukmadinata, N. S. (2013). Metode penelitian pendidikan. PT Remaja Rosdakarya.

Sukowati, A., & Subrata, H. (2022). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, 8(2), 154–160. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v8n2.p154-160>

Sugiyono. (2015). Metode penelitian manajemen. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sule, E. T., & Saefullah, K. (2019). Pengantar manajemen. Prenadamedia.

Susilowati, E. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Al-Miskawaih: Journal of Science Education, 1(1), 115–132. <https://doi.org/10.56436/mijose.v1i1.85>

Tanod, M. J., dkk. (2015). Manajemen sumber daya pendidik dalam pembentukan karakter peserta didik. Jurnal FKIP Unila.

Wahyu Wirawan, Arif, & Wahyudi. (2016). Implementasi pendidikan karakter peserta didik kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 3 Surakarta. Jurnal FKIP UNS.

Winarno, B. (2018). Teori dan proses kebijakan publik. Media Pressindo.

Wiwit Sanjaya, D. (2023). Implementasi pendidikan karakter pada Kurikulum Merdeka menurut kajian filsafat progresivisme. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8(2), 1–8.

Zulhijrah. (2015). Implementasi pendidikan karakter di sekolah. Jurnal Raden Fatah, 1(1).